

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedang berjuang dengan giat untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi yang ada di Indonesia yang tujuannya dimaksudkan untuk mensejahterakan seluruh penduduk Indonesia yang berada di masing-masing Provinsi dengan melakukan pemerataan pembangunan. Pembangunan ini diharapkan dapat menyentuh dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat, tingkat daerah, kabupaten dan bahkan sampai ke pelosok- pelosok desa.

Pembangunan nasional yang sedang digalakan saat ini dimaksudkan untuk mensejahterakan Bangsa Indonesia, di mana hasil-hasil pembangunan dapat menyentuh dan dirasakan manfaatnya keseluruhan lapisan masyarakat, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah bahkan sampai ke pelosok desa. Hal tersebut sesuai dengan arah kebijaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Tap. MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis -Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 (GBHN Bab I (Pendahuluan)) yaitu :

“Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan global.”

Demikian pula sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam GBHN 1999 yaitu :

“-Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia. -Masyarakat Indonesia yang demikian itu harus didukung oleh manusia Indonesia yang mandiri, beriman, bertakwa, berahlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.”

Otonomi daerah ialah kewenangan daerah otonom atau masing – masing provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Untuk bisa mewujudkan cita – cita tersebut, beberapa provinsi di Indonesia menerapkan otonomi daerah yang pada dasarnya adalah upaya melakukan koreksi terhadap berbagai kekurangan terhadap kebijakan yang sebelumnya bersifat terpusat.

Desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya sejalan dengan prinsip demokrasi yang menghargai keberagaman daerah berdasarkan tingkat kemajuan ekonomi secara makro, kekayaan sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia pada masing – masing Provinsi.

Sebelum adanya otonomi daerah, tiap provinsi dan kabupaten hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat untuk menunjang aktivitas kegiatan daerah selain mengandalkan dari sektor pertanian atau industri yang bergerak di masing – masing provinsi. Setelah adanya otonomi daerah, provinsi dan kabupaten diberi kewenangan untuk menjalankan kegiatan ekonominya secara mandiri dengan pantauan Pemerintah Pusat. Dengan adanya otonomi daerah, tiap provinsi dapat mengurangi ketergantungan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan daerah masing - masing.

Agar tercipta kesejahteraan dan kemakmuran untuk mencapai tujuan tersebut sehingga tercapai pembangunan daerah yang optimal, kegiatan pembangunan juga harus diarahkan kepada pembangunan daerah terutama bagi daerah yang relatif tertinggal. Pembangunan daerah harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang optimal tidaklah semudah yang diperkirakan, karena memerlukan suatu perencanaan-perencanaan yang matang dan tentu saja dibutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh dan terus-menerus dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan dan pelaku pembangunan, termasuk didalamnya para penyelenggara negara agar pembangunan nasional berjalan dengan berkelanjutan dan berkesinambungan.

Maka dari itu, Bangsa Indonesia saat ini mulai mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut dengan memulai pembangunan di daerah yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka strategi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan menuntut adanya bobot, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk itu dibutuhkan adanya Keuangan Daerah, khususnya penerimaan yang dihimpun dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat pada setiap daerah, yaitu yang berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

PAD sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah juga merupakan suatu konsekuensi yang tidak dapat di hindari bilamana volume pembangunan daerah yang diinginkan terus -menerus mengalami peningkatan.

Secara umum kemampuan keuangan dipandang sebagai tolok ukur atau kriteria kemampuan suatu daerah menyelenggarakan tugas-tugas pembangunannya. Namun penghimpunan PAD itu sendiri tentu saja tidak datang begitu saja dengan mudah dan cepat didapat. Dibutuhkan suatu penggalan-penggalan potensi dari daerah yang dapat mempertinggi jumlah dana keuangan daerah khususnya PAD. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan adanya prakarsa, kreativitas dan kemauan dari masyarakat dan sudah tentu aparat pemerintah sebagai motor penggerak.

Bagaimanapun juga terkadang suatu usaha yang keras belum tentu dapat membuahkan hasil yang memuaskan, sebagaimana jika kita lihat selama berjalannya pembangunan daerah, penerimaan yang didapat dari PAD masih belum sepenuhnya dapat mencukupi pembangunan yang sedang dijalankan.

Hal ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan bahwa kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi secara nyata dan bertanggungjawab masih belum berjalan dengan baik.

Hal tersebut mengakibatkan banyak urusan rumah tangga atau isi otonomi yang mampu atau yang sanggup dilaksanakan secara nyata masih tetap membutuhkan bantuan sebagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) selama ini, yang berarti pemerintah mempunyai kewajiban dalam membina daerah. Hal ini dapat juga berarti bahwa adanya indikator ketergantungan dari pemerintah daerah terhadap pemberian DAU dan DAK serta bantuan pemerintah pusat.

Adanya pemberian dana alokasi dari pemerintah pusat atau sering disebut sebagai Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dimaksudkan untuk membantu membiayai rumah tangga daerah di dalam melaksanakan pembangunan, juga untuk membiayai hal-hal yang khusus. Dalam hal ini juga diharapkan bahwa di masa yang akan datang tidak lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Di masa datang daerah harus mandiri dalam menggali PAD termasuk mengatur manajemennya.

Dapat digaris bawahi bahwa PAD, DAU dan DAK merupakan suatu komponen dari keuangan daerah yang akan membiayai segala operasional pembangunan yang ada di suatu daerah. Tentu saja pembiayaan tersebut akan menghasilkan suatu hasil pembangunan, kita akan mendapatkan suatu output atau dapat di sebut sebagai Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Tingkat tinggi rendahnya PAD, DAU dan DAK tentu saja secara otomatis akan mempengaruhi tingkat tinggi-rendahnya PDRB dalam suatu daerah atau suatu wilayah tertentu pada suatu waktu tertentu pula, umumnya dalam jangka waktu satu tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Indikator tersebut tidak hanya menunjukan bagaimana hasil-hasil pembangunan tersebut di distribusikan dan siapa saja yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan ekonomi tetapi seberapa jauh pembangunan telah berhasil mensejahterakan masyarakatnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Pengangguran, dan Pengeluaran Konsumsi.

Bagi daerah yang mempunyai banyak potensi, seperti potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia, tentu saja akan menghasilkan PAD dengan jumlah yang sangat tinggi apalagi jika ditambahkan dengan DAU dan DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat. Maka tentu saja secara otomatis tingkat Pertumbuhan Ekonomi daerah tersebut akan tinggi, yang menandakan bahwa pembangunan di daerah tersebut berjalan dengan baik karena biaya pembangunan yang tercukupi.

Sedangkan bagi daerah yang potensi sumber dayanya kurang, tentu saja jumlah PAD yang dimiliki kurang memuaskan atau dapat dikatakan rendah walaupun sudah ditambahkan dengan DAU dan DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam kasus ini tentu saja tingkat Pertumbuhan

Ekonominya cenderung rendah atau dapat juga dikatakan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung di daerah ini tidak berjalan dengan baik. Maka, daerah dalam kondisi seperti inilah yang harus dapat menggali potensi lain yang ada di wilayahnya untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Begitu banyak potensi yang dimiliki oleh provinsi DI Yogyakarta yang tentu saja mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli daerah (PAD) yang diterima oleh provinsi D.I Yogyakarta, sehingga apabila digunakan secara tepat sasaran dan bijaksana pastilah akan terus mendorong laju pertumbuhan perekonomian provinsi D.I. Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Maryati dan Endrawati (2010) “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus Sumatera Barat”. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan objek studi penelitian pada kabupaten dan kota di provinsi D.I. Yogyakarta periode 2006-2013 untuk membedakan dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul: “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) , DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

(STUDI KASUS : PROVINSI D.I. YOGYAKARTA PERIODE 2006-2013)”.
.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis berdasarkan latar belakang adalah :

1. Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi D.I. Yogyakarta selama tahun 2006-2013?
2. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi D.I. Yogyakarta selama tahun 2006-2013?
3. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi D.I. Yogyakarta selama tahun 2006-2013?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jawaban atas perumusan masalah yaitu :

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi D.I. Yogyakarta selama tahun 2006-2013.
2. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi D.I. Yogyakarta selama tahun 2006-2013.

3. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi D.I. Yogyakarta selama tahun 2006-2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah, skripsi ini diharapkan dapat dijadikan kajian di dalam mewujudkan cita-cita pemerintah mengenai pemerataan pembangunan yang ada di seluruh wilayah Indonesia serta dapat menjadi dasar perhitungan pemerintah untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi khususnya D.I. Yogyakarta.
2. Bagi tiap-tiap provinsi, penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai analisis dari besarnya pengaruh atau kontribusi riil yang diberikan oleh Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) sebuah provinsi khususnya provinsi D.I. Yogyakarta.
3. Bagi masyarakat, penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang sumber-sumber penerimaan Pemerintah Daerah serta sejauh mana faktor-faktor lain dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.
4. Dan bagi penulis, penulisan skripsi ini adalah upaya untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Ekonomi tempat saya menuntut ilmu perkuliahan.

E. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai apa yang dibahas dalam skripsi ini, maka disusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini pendahuluan akan diuraikan pandangan-pandangan yang bersifat umum mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan sistematika Penulisan. Latar belakang memberikan uraian mengenai hal yang melatarbelakangi permasalahan yang perlu diteliti. Perumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, untuk meneliti hubungan antara faktor-faktor yang diduga mempengaruhi fakta yang ada. Tujuan penelitian untuk menjelaskan secara singkat penulisan bagi pembaca dan penulis sendiri. Sistematika penulisan untuk memudahkan dalam penulisan dengan membagi-bagi bab dari skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan memberikan suatu analisa berdasarkan penelitian terdahulu, landasan teori yang ada mengenai Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Kerangka Pikir Penelitian, dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Definisi Operasional Variabel, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini hasil penelitian yang mencakup gambaran umum tentang obyek penelitian, serta hasil pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Penulis juga melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan penulis mencoba memberikan saran yang mungkin berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.